

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
BAB I : KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERPAJAKAN.....	1
A. Masyarakat Sebagai Wajib Pajak.....	1
B. Asas-asas Negara Hukum Kesejahteraan	23
1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan.....	23
2. Teori Kesalahan Kolektif.....	26
C. Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	29
D. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	33
E. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perusahaan/Korporasi	40
F. Sistem Perpajakan <i>Self Assessment</i> di Indonesia...	48
G. Modus Operandi Tindak Pidana Perpajakan.....	57
BAB II : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERPAJAKAN	62
A. Asas <i>Lex Systematic</i> – UU KUP	62
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perpajakan.....	71
C. Kendala Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korporasi Perpajakan....	87
D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Korupsi Perpajakan...	97
BAB III : PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERPAJAKAN.....	103
A. Sanksi Mengedepankan Pengembalian	

Kerugian Negara	103
B. <i>Restorative Justice</i> , Mengutamakan Pemulihan Hubungan Sosial.....	115
C. Efisiensi Bekerjanya Hukum Pidana	128
D. Penegakan Hukum Progresif	137
BAB IV : IMPLEMENTASI TEORI LAWRENCE	
M. FRIEDMANN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERPAJAKAN	156
A. Materi/Substansi/Isi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	157
B. Struktur/Aparatur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	176
C. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	189
BAB V : PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN ANTI KORUPSI	199
A. Penyempurnaan UU KUP dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Maju.....	199
B. Tata Kelola Birokrasi Perpajakan Indonesia.....	299
C. Sinkronisasi & Harmonisasi UU KUP Dan Undang-Undang Terkait	307
DAFTAR PUSTAKA.....	352
GLOSARIUM.....	357
INDEKS.....	373
RIWAYAT PENULIS.....	380